BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan kewajiban bagi warga Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap negara dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Pajak memang menjadi sumber penerimaan terbesar di Indonesia dan memainkan peran yang sangat penting dalam kelangsungan pembangunan negara, hal ini dapat dilihat dari besarnya porsi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pembangunan negara akan sulit dilaksanakan secara optimal.

Menurut (Mardiasmo, 2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki 3 sistem pemungutan yaitu *Official Assessment System*, *Self Assesment System*, dan *Withholding System*. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah *Self Assessment*, yang berarti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan

perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan sistem ini, diharapkan peran aktif dan kejujuran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem *Self Assessment* ini dianggap berhasil apabila wajib pajak memiliki beberapa syarat yang harus ada dalam diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*), kejujuran (*good faith*), kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*tax mindness*), kedisiplinan (*tax discipline*) dan kepatuhan (M.Farouq S, 2018). Sistem tersebut mengharuskan wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dengan baik, namun kenyataannya masih banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai peraturan perpajakan dan cara menghitung pajak yang benar. Dengan penerapan sistem *self assessment* ini akan memberikan peluang terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah berharap dengan meningkatnya kesadaran atau pemahaman masyarakat akan pentingnya perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Namun, dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak masih terdapat berbagai hambatan. Salah satu hambatan utamanya adalah tingginya tunggakan pajak yang disebabkan oleh penghindaran pajak murni dan ketidakmampuan membayar pajak. Karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut perlu tindakan pencegahan yang kuat melalui aturan paksa dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pajak.

Salah satu tindakan pemerintah agar masyarakat mampu meningkatkan kesadarannya dalam taat lapor pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran, objek pajak dan/atau bukan objek, dan/atau harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor Per-01/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat pemberitahuan Elektronik, kini pemerintah telah membuat peraturan baru yaitu melapor SPT Elektronik dengan menggunakan e-filling dan e-billing, selain manfaatnya untuk taat membayar pajak, sekaligus juga dapat mempermudah masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Peraturan tersebut nyatanya berjalan kurang baik, karena masih saja terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan tersebut bahkan ada juga wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, maka wajib pajak yang tidak melapor SPT tersebut akan mendapat sanksi berupa denda. Apabila ditemukannya SPT wajib pajak mengenai data harta yang dimiliki wajib pajak yang bersangkutan tetapi selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan upaya penagihan pajak dengan menerbitkan suatu produk hukum berupa Surat Himbauan kepada Wajib Pajak. Surat Himbauan tersebut bertujuan agar wajib pajak melakukan pembetulan SPT yang sudah disampaikan, sebelum dilakukannya pemeriksaan. Berdasarkan Surat Ketentuan Pajak (SKP) yang sesuai dengan pasal 13 UU KUP, apabila wajib pajak tidak membayar hingga jatuh tempo, maka akan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak

memiliki dasar hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak yang termuat dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda serta berfungsi sebagai sarana untuk mengoreksi pajak terutang, memberikan sanksi kepada Wajib Pajak dan menagih pajak. Pada prinsipnya, Surat Tagihan Pajak akan menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan bertambah dan harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal penerbitan. Surat Tagihan Pajak dibuat oleh *Account Representative* (AR) yang kemudian dikirim kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT.

Penulis memilih tempat pelaksanaan magang di KPP Pratama Jambi Telanaipura karena penulis ingin mengetahui dan melihat pelaksanaan perpajakan dan sistem perpajakan di jalan secara langsung. Selama pelaksanaan magang, penulis mengetahui masalah yang terjadi pada KPP Pratama Jambi Telanaipura yaitu masih saja terdapat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak sehingga diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP). Dalam pelaksanaan magang penulis ditempatkan pada bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi V & VI yang dimana merupakan salah satu bagian yang terlibat pada saat penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Oleh karena itu, penulis lebih tertarik untuk membahas terkait prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan ingin mengetahui lebih dalam bagaimana

dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan STP. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membahas lebih lanjut dengan judul Laporan Tugas Akhir “**Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura**”

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi masalah pokok laporan adalah:

1. Bagaimana prosedur penerbitan surat tagihan pajak (STP) pada seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan surat tagihan pajak (STP) pada seksi pengawasan dna konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP pada seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

2. Menjelaskan apa saja kendala dalam proses penerbitan Surat Tagihan Pajak pada seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Menambah wawasan mahasiswa serta memberikan pengetahuan mengenai prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Sebagai bahan pertimbangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura untuk meningkatkan mutu pelayanan wajib pajak

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan data laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung serta melakukan wawancara langsung kepada salah satu pegawai yaitu Pelaksana di Seksi Pengawasan dan Konsultasi VI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura terkait prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui literatur yang berkaitan dengan prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan data tentang sejarah kantor, struktur organisasi serta visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam Penyusunan laporan ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Metode Observasi

Dalam metode ini penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung atas kegiatan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

b) Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara langsung dengan staf Pelaksana di seksi pengawasan dan konsultasi yang terlibat dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

c) Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis memperoleh data berdasarkan dokumen-dokumen, buku, internet dan lain-lain.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai 13 April 2023, lokasi pelaksanaan magang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura, yang beralamat di JL.A. Thalib, Pematang Sulur, Kec.Telanaipura, Kota Jambi 36124. Waktu jam kerja 07.30-17.00 WIB.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini, penulis jabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan judul laporan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan konsep dan landasan teori yang menjadi dasar penelitian yang berhubungan dengan judul dan hasil praktik magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura, Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan STP

BAB IV : KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian dalam BAB III atas tujuan yang telah dilakukan, kemudian penulis memberikan saran bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN